

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN  
TAHUN 2024**

**Informasi yang dikecualikan**

adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian informasi harus didasarkan pada **pengujian konsekuensi**.

➤ **Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan :**

1. Sebelum adanya permohonan informasi publik.
2. Pada saat adanya permohonan informasi publik.
3. Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik.

➤ **Informasi publik yang dikecualikan paling sedikit memuat :**

- Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan
- Identitas pejabat PPID yang menetapkan
- Badan publik
- Jangka waktu pengecualian
- Alasan pengecualian
- Tempat dan tanggal pengecualian

**DAFTAR INFORMASI YANG DI KEQUALIKAN 2024  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN**

INFORMASI SECARA BERKALA						
NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT INFORMASI DIBUKA	MANFAAT INFORMASI DITUTUP
1	Hasil Assessment Pengujian PNS	Perka BKN No. 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	BKPSDM	Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian)	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun a. CPNS b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah)	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	BKPSDM	Sampai dengan pengumuman	Menimbulkan keresahan	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
3	Penilaian Kinerja/Prestasi Kerja PNS	PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	BKPSDM	Selama undang-Undang berlaku	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
4	Data Usulan Pemindahan Pengangkatan PNS (mutasi)	PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	BKPSDM	Sampai diterbitkannya SK	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
5	Ijin Perceraian PNS	PP 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP No 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS	BKPSDM	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan	Pihak luar campur tangan	Menjaga kondisi yang kondusif selama proses ijin berlangsung
6	Hukuman Disiplin Pegawai	PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	BKPSDM	Tak terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7	Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Madiun	UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	BKPSDM	Selama Proses Penerimaan CPNS	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

INFORMASI SECARA BERKALA						
NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT INFORMASI DIBUKA	MANFAAT INFORMASI DITUTUP
8	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H	BKPSDM	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan ) pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA MADIUN**



**Drs. HARIS RAHMANUDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196608131992031009

Tembusan :  
Yth. Walikota Madiun (sebagai laporan)